

Model Pelayanan Publik Partisipatif Di Distrik Sorong Timur Berkbasis Kearifan Lokal

Ana Lestari¹, Salwa Fatika Sari Salempang², Siti Nurjannah³, Aswad Muhdar⁴, Akmal Ridwan⁵, Reva Sarah
Toding Datu⁶, Nurul Ramadani⁷
¹²³⁴⁵⁶Prodi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email: salwasalempang14@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di tingkat daerah. Namun demikian, dalam praktiknya pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengembangkan model pelayanan publik partisipatif berbasis kearifan lokal di Distrik Sorong Timur melalui pendekatan "Kitorang Duduk". Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pendekatan partisipatif dalam implementasinya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model "Kitorang Duduk" mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, mempercepat penyelesaian permasalahan pelayanan publik melalui forum musyawarah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu, peningkatan jumlah aspirasi masyarakat melalui kotak saran menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Model ini juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih aktif dan kolaboratif. Secara keseluruhan, model ini terbukti efektif dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, serta memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa.

Kata kunci: pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, collaborative governance,

Abstract

Quality public service is a key indicator in achieving good governance, particularly at the local government level. However, in practice, public service delivery still faces various challenges, including limited resources, low levels of community participation, and the underutilization of local wisdom. This Community Service Program (PKM) aims to develop a participatory public service model based on local wisdom in East Sorong District through the "Kitorang Duduk" approach. The study employs a qualitative method using observation, interviews, and documentation, combined with a participatory approach in its implementation. The results indicate that the "Kitorang Duduk" model significantly enhances community participation, accelerates the resolution of public service issues through deliberative forums, and improves transparency and accountability in service delivery. Furthermore, the increase in community feedback through suggestion boxes reflects higher levels of public trust and satisfaction. The model also encourages behavioral changes among community members toward a more active and collaborative role. Overall, this model proves effective in creating inclusive, adaptive, and sustainable public services based on local wisdom, and has strong potential for replication in other regions with similar socio-cultural characteristics.

Keywords: public service, community participation, local wisdom, collaborative governance, community service

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyediakan layanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, hasil studi Bovaird & Loeffler (2016) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat lokal masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, lemahnya sistem pelayanan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi model pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu wilayah.

(Asriani, 2023) Kondisi tersebut juga dapat diamati di Distrik Sorong Timur sebagai salah satu wilayah administratif yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Distrik ini membawahi empat kelurahan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sistem pelayanan publik di wilayah ini telah berjalan secara berjenjang, di mana pelayanan administrasi dasar seperti pembuatan surat keterangan usaha dan surat pengantar dilaksanakan di tingkat kelurahan, sedangkan distrik berperan sebagai koordinator, pengawas, dan pelaksana pelayanan lanjutan. Secara umum, pelayanan di distrik dinilai cukup optimal dengan prosedur yang tidak berbelit-belit serta didukung oleh kedisiplinan aparatur melalui penerapan sistem absensi berbasis fingerprint. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan fasilitas pelayanan, termasuk kurangnya komputer, kursi, serta sarana pendukung lainnya, yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan. Selain itu, ketergantungan pada pejabat tertentu dalam proses administrasi, seperti penandatanganan dokumen, juga menjadi faktor yang dapat memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

(Rahmayanti et al., 2026) Dari aspek sosial, masyarakat di Distrik Sorong Timur memiliki potensi modal sosial yang kuat, ditandai dengan adanya hubungan kekeluargaan dan budaya musyawarah yang masih terjaga. Dalam perspektif kontemporer, modal sosial ini menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif Putnam, (2020). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem pelayanan publik yang ada. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai permasalahan di lapangan, seperti konflik pengelolaan sampah antar kelurahan, ketidakmerataan distribusi bantuan sosial, serta keluhan masyarakat terhadap pelayanan di tingkat kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung diposisikan sebagai objek pelayanan, bukan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pelayanan publik. Padahal, penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Voorberg (2017).

(Hasrianti, 2023) Konsep pelayanan publik partisipatif menjadi sangat relevan untuk dikembangkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi Loeffler & Bovaird (2020). Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, khususnya di wilayah dengan karakter sosial budaya yang kuat. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan kearifan lokal, seperti nilai musyawarah, gotong royong, dan solidaritas sosial, dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat Sibarani (2018), Prasajo (2019) dan Dwiyanto (2021). Pendekatan berbasis lokal ini juga dinilai mampu menciptakan inovasi pelayanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan karena berakar pada kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi empiris dan kajian literatur tersebut, permasalahan utama yang dihadapi dalam pelayanan publik di Distrik Sorong Timur terletak pada belum optimalnya integrasi antara sistem pelayanan formal dengan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pelayanan publik yang ada, menggali potensi kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan, serta merancang model pelayanan publik partisipatif berbasis kearifan lokal

yang aplikatif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan bentuk hilirisasi dari berbagai hasil pengabdian sebelumnya terkait pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di Distrik Sorong Timur.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam konteks pengembangan model pelayanan publik berbasis kearifan lokal di Distrik Sorong Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman aktor-aktor yang terlibat secara kontekstual dan komprehensif (Creswell, 2016). Selain itu, pendekatan ini relevan digunakan dalam studi pelayanan publik partisipatif karena menekankan pemahaman terhadap dinamika sosial dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Nabatchi et al., 2017).

(Muhdar et al., 2024) Teknik pengumpulan data dalam pengabdian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi pengabdian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai proses pelayanan publik, pola interaksi antara aparaturnya dan masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Metode ini sejalan dengan pendekatan observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara lebih mendalam (Marshall & Rossman, 2016). Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang terdiri dari aparaturnya distrik, kepala kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga sebagai pengguna layanan. Teknik wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam (Creswell, 2016). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan arsip, laporan kegiatan, serta dokumen terkait yang relevan dengan pengabdian (Yin, 2018).

(Di et al., 2025) Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus pengabdian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses pengabdian untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari data yang diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, pengabdian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Yin, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Pelayanan Publik dan Identifikasi Permasalahan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kondisi pelayanan publik di Distrik Sorong Timur secara umum telah berjalan cukup baik secara administratif, namun belum optimal dari aspek partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelayanan masih didominasi oleh pendekatan top-down, di mana masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima layanan. Kondisi awal pelayanan publik di Distrik Sorong Timur secara umum telah berjalan cukup baik, ditandai dengan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit serta adanya pembagian tugas yang jelas antara kelurahan dan distrik. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan fasilitas pelayanan seperti komputer dan sarana

pendukung lainnya, ketergantungan pada pejabat tertentu dalam proses administrasi, serta munculnya berbagai permasalahan sosial seperti konflik pengelolaan sampah dan ketidakmerataan distribusi bantuan sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik masih tergolong rendah, di mana masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima layanan dibandingkan sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 1. Identifikasi Masalah Pelayanan Publik yang terjadi

Permasalahan yang ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas pelayanan, ketergantungan pada pejabat tertentu dalam proses administrasi, serta munculnya konflik sosial seperti pengelolaan sampah dan distribusi bantuan sosial. Melalui pendekatan *participatory rural appraisal* (Pain & Francis, 2019), proses identifikasi masalah dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Keterlibatan masyarakat dalam tahap awal ini terbukti mampu meningkatkan kualitas data serta memperkuat dasar perumusan solusi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

B. Implementasi Model “Kitorang Duduk” dalam Perspektif Collaborative Governance

Tahap selanjutnya adalah implementasi model “Kitorang Duduk” melalui forum musyawarah besar (*mubes*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang deliberatif bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan solusi secara kolektif. Proses ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance*, yaitu suatu mekanisme tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah secara bersama dalam pengambilan keputusan publik. Secara teoritis, *collaborative governance* merupakan proses di mana berbagai pemangku kepentingan berinteraksi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara individual.



Gambar 2. Memberikan pengarahan mengenai Model dari Kepala Seksi

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya konsensus, dialog, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan. Studi terbaru menunjukkan bahwa *collaborative governance* mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan nilai publik yang lebih besar melalui kolaborasi lintas aktor. Hasil implementasi model “Kitorang Duduk” menunjukkan bahwa forum musyawarah mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah. Permasalahan yang

sebelumnya bersifat konflik dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kontekstual dan diterima oleh seluruh pihak. Hal ini memperkuat temuan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan legitimasi kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

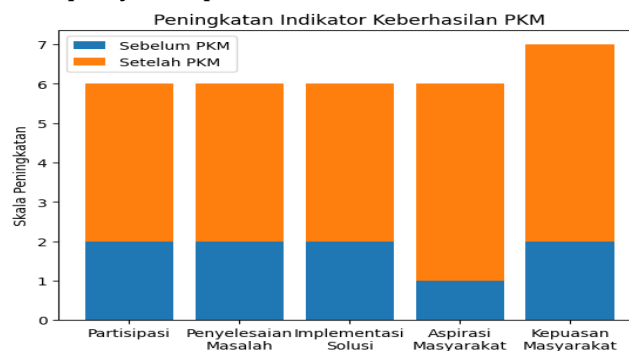
C. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Co-Production Pelayanan Publik

Penerapan model “Kitorang Duduk” juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam forum musyawarah, tetapi juga mulai berperan aktif dalam memberikan masukan, kritik, serta ide terhadap pelayanan publik. Kondisi ini mencerminkan terjadinya *co-production*, di mana masyarakat berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Loeffler dan Bovaird (2020), *co-production* merupakan pendekatan yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui keterlibatan langsung pengguna layanan. Selain itu, Voorberg et al. (2017) menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat berdampak pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan, serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Selain keterlibatan dalam forum musyawarah, peningkatan partisipasi masyarakat juga terlihat melalui pemanfaatan media aspirasi berupa kotak saran yang disediakan di kantor distrik. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, setelah implementasi program, terjadi peningkatan jumlah aspirasi, kritik, dan ide yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk terlibat dalam proses pelayanan publik secara berkelanjutan. Fenomena ini sejalan dengan konsep *citizen feedback mechanisms* yang menekankan pentingnya saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Wirtz & Daiser, 2018). Dengan adanya media aspirasi ini, masyarakat tidak hanya terlibat secara langsung dalam forum deliberatif, tetapi juga memiliki ruang partisipasi yang lebih luas dan fleksibel. Kondisi ini memperkuat praktik *co-production* dalam pelayanan publik, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan (Nabatchi et al., 2017).

D. Dampak Program terhadap Kepuasan dan Perubahan Sosial Masyarakat

Dari perspektif hasil, kegiatan PKM ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat yang signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam forum “Kitorang Duduk”, bertambahnya jumlah aspirasi yang disampaikan, serta keberhasilan implementasi solusi terhadap permasalahan pelayanan publik. Kepuasan masyarakat ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah serta perubahan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka dan kolaboratif. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Distrik Sorong Timur melalui penerapan model pelayanan publik partisipatif berbasis kearifan lokal “Kitorang Duduk” menunjukkan adanya perubahan yang signifikan baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun kelembagaan pemerintah distrik. Evaluasi dampak program dilakukan terhadap lima indikator utama menggunakan skala penilaian 1–7 berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan diskusi evaluatif bersama aparat distrik dan perwakilan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari skor 2,0 sebelum program menjadi 6,0 setelah program atau mengalami peningkatan sebesar 200%. Indikator penyelesaian permasalahan pelayanan juga meningkat dari 2,0 menjadi 6,0, sedangkan implementasi solusi hasil musyawarah mengalami peningkatan dari 2,0 menjadi 6,0. Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada indikator aspirasi masyarakat, yaitu dari skor 1,0 menjadi 6,0, yang menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik, dan usulan melalui forum *Kitorang Duduk* maupun media kotak saran. Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat dari skor 2,0 menjadi 7,0, atau sekitar 250%, sehingga menjadi indikator dengan capaian tertinggi setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi konsep pelayanan publik partisipatif, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dari pasif menjadi aktif dalam proses pelayanan publik.



Grafik 1. Indikator Keberhasilan Model Kitorang Duduk

Temuan ini sejalan dengan OECD (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Selain itu, mekanisme umpan balik masyarakat (citizen feedback) merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Dengan demikian, model “Kitorang Duduk” tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa penyelesaian masalah, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa perubahan perilaku sosial masyarakat menuju budaya partisipatif.

E. Keunggulan, Keterbatasan, dan Peluang Pengembangan Model

Model “Kitorang Duduk” memiliki keunggulan utama dalam kesesuaiannya dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, seperti musyawarah, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Hal ini menjadikan model ini lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam konteks lokal. Sibarani (2018) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan modal sosial yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik, sementara Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa pelayanan publik yang berbasis nilai lokal cenderung lebih adaptif dan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, variasi tingkat pemahaman masyarakat, serta kebutuhan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan. Selain itu, proses kolaboratif membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena melibatkan banyak aktor dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, model ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penguatan kelembagaan, integrasi ke dalam sistem pelayanan formal, serta replikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa.

Dari perspektif keberlanjutan, model “Kitorang Duduk” memiliki potensi yang kuat untuk diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari sistem pelayanan publik di Distrik Sorong Timur. Hal ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian forum musyawarah ke dalam agenda rutin pemerintahan distrik serta penguatan regulasi internal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam setiap proses pelayanan publik. Lebih lanjut, pengembangan model ini juga dapat diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi, seperti digitalisasi kotak saran atau platform pengaduan online, guna memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pelayanan publik partisipatif mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan (OECD, 2020). Dengan demikian, model “Kitorang Duduk” tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang menjadi inovasi pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan di era digital.



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama dengan Pejabat Distrik Sorong Timur

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui penerapan model pelayanan publik partisipatif berbasis kearifan lokal “Kitorang Duduk” di Distrik Sorong Timur terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, efektivitas penyelesaian masalah melalui musyawarah, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Inovasi seperti kotak saran juga berhasil mendorong peningkatan aspirasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, sementara forum “Kitorang Duduk” mampu menghasilkan solusi nyata yang kontekstual. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, perbedaan pemahaman masyarakat, serta ketergantungan pada komitmen aparatur dan kebutuhan koordinasi yang intensif. Terlepas dari keterbatasan tersebut, model ini memiliki keunggulan karena selaras dengan nilai sosial masyarakat yang menjunjung musyawarah dan kebersamaan, sehingga berpotensi besar untuk dikembangkan melalui penguatan kelembagaan, integrasi ke sistem formal, replikasi di wilayah lain, serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “*Model Pelayanan Publik Partisipatif di Distrik Sorong Timur Berbasis Kearifan Lokal*” menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Distrik, aparatur distrik, kepala kelurahan, ketua RT/RW, tokoh agama, serta seluruh masyarakat di Distrik Sorong Timur atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa selama kegiatan berlangsung. Keberhasilan program ini tidak terlepas

dari partisipasi aktif, keterbukaan, serta antusiasme masyarakat dalam mengikuti forum “Kitorang Duduk” dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses koordinasi, pelaksanaan, serta tindak lanjut kegiatan, khususnya aparat distrik yang telah memfasilitasi pelaksanaan program serta mendukung implementasi model pelayanan publik partisipatif ini secara berkelanjutan. Diharapkan sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, N. (2023). *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik:Faksi* /. 9(3), 11–20.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2016). From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. *Voluntas*, 27(5), 2229–2252.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Elstob, S., & Escobar, O. (2019). *Handbook of democratic innovation and governance*. Edward Elgar Publishing.
- Di, P., Pln, P. T., Ulp, P., & Kota, S. (2025). *JoSPA (Journal of State and Public Administrations)*. 2(1), 1–10.
- Hasrianti. (2023). Penggunaan Big Data Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik:Faksi*, 9(3), 42–56. <https://doi.org/10.33506/jf.v9i3.3152>
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2020). Assessing the impact of co-production on public services. *International Public Management Journal*, 23(2), 205–223.
- Muhdar, A., Lestari, A., Refra, M. S., & Nurjannah, S. (2024). *Implementasi Nilai-Nilai Etika Terhadap Pelayanan Administrasi di Distrik Sayosa Timur Kabupaten Sorong*. 3(5), 1134–1141.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services. *Public Administration Review*, 77(5), 766–776.
- OECD. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and public service management. *Public Management Review*, 18(5), 639–653.
- Pain, R., & Francis, P. (2019). Reflections on participatory research. *Area*, 51(2), 243–251.
- Prasojo, E. (2019). Inovasi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 123–135.
- Putnam, R. D. (2020). *The upswing*. Simon & Schuster.
- Rahmayanti, N., Nurjanah, S., & Sorong, U. M. (2026). *JoSPA (Journal os state and Public Administrations)*. 2(1).
- Sibarani, R. (2018). *Kearifan lokal*. Asosiasi Tradisi Lisan.
- Torring, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2020). *Interactive governance*. Oxford University Press.
- Voorberg, W. H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2017). Co-creation and co-production. *Public Management Review*, 19(9), 1333–1357.
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). E-government research. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 144–163.
- World Bank. (2018). *Improving public sector performance*. World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.